

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Peran

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (lembaga) menjalankan suatu peran. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung yang lain dan sebaliknya. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya (Wahyudi :2014).

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Pentingnya peran adalah bahwa hal itu mengatur perlakuan seseorang atau lembaga dan juga menyebabkan seseorang atau lembaga pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga orang atau lembaga yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perlakuan sendiri dengan perlakuan orang-orang sekelompoknya. Peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Suatu peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran dalam konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat (Soekanto : 2000).

Pembahasan peranan-peranan tertentu yang melekat pada lembaga dalam lembaga masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya diletakan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksananya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan pribadinya.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut (Soekanto :2000).

Menurut Friedman, M, struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peran formal (peran yang tampak jelas), yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istriibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.
- b. Peran informal (peran tertutup), yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

2.1.1. Ketidakberhasilan Peran

Dalam kaitannya dengan peran yang harus dilakukan, tidak semuanya mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kurangberhasilan dalam menjalankan perannya. Dalam ilmu sosial, ketidakberhasilan ini terwujud dalam *role conflict* dan *role strain*.

1. Role Conflict

Setiap orang memainkan sejumlah peran yang berbeda, dan kadang-kadang peran-peran tersebut membawa harapan-harapan yang bertentangan. Menurut Hendropuspito [1989], konflik peran (role conflict) sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati suatu pola, seseorang harus melanggar pola lain. Setidaknya ada dua macam konflik peran. Yakni, konflik antara berbagai peran yang berbeda, dan konflik dalam satu peran tunggal. Pertama, satu atau lebih peran (apakah itu peran independen atau bagian-bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. Kedua, dalam peran tunggal mungkin ada konflik inheren.

2. Role Strain

Adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran yang sama ini dinamakan role strain. Satu hal yang menyebabkan terjadinya role strain adalah karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan berbagai status lain yang berbeda. Sampai tingkatan tertentu, masing-masing interaksi ini merumuskan peran yang berbeda, karena membawa harapan-harapan yang berbeda pula. Maka, apa yang tampak sebagai satu peran tunggal mungkin dalam sejumlah aspek sebenarnya adalah beberapa peran. Misalnya, status sebagai karyawan bagian pemasaran (sales) eceran di sebuah perusahaan,

dalam arti tertentu sebenarnya membawa beberapa peran: sebagai bawahan (terhadap atasan di perusahaan itu), sebagai sesama pekerja (terhadap karyawan-karyawan lain di perusahaan itu), dan sebagai penjual (terhadap konsumen dan masyarakat yang ditawarkan produk perusahaan tersebut).

3. Stres Peran

Posisi dimasyarakat dapat merupakan stresor terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran, atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Stres peran terdiri dari :

- a. Konflik peran, dialami jika peran yang diminta konflik dengan sistem individu atau dua peran yang konflik satu sama yang lain.
- b. Peran yang tidak jelas, terjadi jika individu yang diberi peran yang tidak jelas dalam hal perilaku dan penampilan yang diharapkan.
- c. Peran yang tidak sesuai, terjadi jika individu dalam proses transisi merubah nilai dan sikap. Misalnya, seseorang yang masuk dalam satu profesi, dimana terdapat konflik antara nilai individu dan profesi.

Peran berlebih, terjadi jika individu menerima banyak peran misalnya, sebagai istri, mahasiswa, perawat, ibu. Individu dituntut melakukan banyak hal tetapi tidak tersedia waktu untuk menyelesaikannya.

2.1.2. Organisasi

2.1.2.1. Pengertian Organisasi

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama(Sukarman : 2014).Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan(Sukarman : 2014).Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama (Purwanto :2011). Berdasarkan pendapat Siswanto tersebut, bahwa organisasi adalah interaksi antara sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam KBBI diterangkan bahwa organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang- orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap organisasi harus mempunyai tiga unsur dasar yaitu sekelompok orang, kerjasama dan tujuan yang hendak dicapai.Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan bersama.Dalam membentuk atau menentukan sebuah organisasi harus diperhatikan ciri-ciri yang ada.Ciri-ciri organisasi merupakan beberapa hal yang harus ada.

Ciri-ciri organisasi yaitu:

1. Suatu organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
2. Dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima dan juga saling bekerjasama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud (*purpose*), sasaran (*objective*) dan tujuan (*goal*).
3. Dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu, yaitu tujuan bersama dan ingin direalisasikan (Purwanto :2011).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam organisasi ada gabungan sekelompok orang yang terikat norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan, ada rasa saling bersama dan ada tujuan bersama. Organisasi yang diikuti oleh mahasiswa atau yang biasa disebut dengan Ormawa atau organisasi kemahasiswaan mengemukakan Pada dasarnya, organisasi mahasiswa di suatu Perguruan Tinggi, diselenggarakan atas dasar prinsip dari oleh dan untuk mahasiswa itu sendiri. Organisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan mahasiswa kearah perluasan wawasan peningkatan ilmu dan pengetahuan serta integritas kepribadian mahasiswa. Ormawa juga sebagai wadah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di Perguruan Tinggi

yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa itu sendiri (Laksmi :2011).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan organisasi kemahasiswaan meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran yang bisa diikuti oleh mahasiswa di tingkat jurusan, fakultas dan Universitas yang bertujuan untuk memperluas wawasan, ilmu dan pengetahuan serta membentuk kepribadian mahasiswa. Bertitik tolak dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi yaitu mahasiswa yang secara aktif menggabungkan diri dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, menyalurkan bakat, memperluas wawasan dan membentuk kepribadian mahasiswa seutuhnya.

2.1.2.2. Jenis-jenis Organisasi

Kampus sebagai bagian dari lingkungan sosial kemasyarakatan menjadi tempat penguatan kapasitas intelektual mahasiswa secara ilmiah dan sebagai tempat pembentukan moral dan kepribadian mahasiswa melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di dalamnya. Berbagai kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dalam rangka mendukung terciptanya kepribadian mahasiswa seutuhnya. Universitas Medan Area juga menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan sebagai wadah bagi mahasiswa

yang ingin menyalurkan minat, bakat dan kegemarannya di bidangnya masing-masing.

Secara historik ada dua macam organisasi mahasiswa berdasarkan lingkungan kegiatannya, yakni:

1. Organisasi Mahasiswa *Intrauniversiter*(organisasi intra)

Organisasi mahasiswa intrakampus adalah organisasi mahasiswa yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan Perguruan Tinggi tertentu dan mendapat pendanaan kegiatan kemahasiswaan secara mandiri, dari pengelola Perguruan Tinggi dan atau dari Kementerian/Lembaga. Bentuknya dapat berupa Ikatan Organisasi Komunitas (IOK), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Kewenangan pengaturan sepenuhnya ada di tangan pemimpin Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Statuta (UU No. 12 Tahun 2012).

Adapun organisasi intra kampus di Universitas Medan Area yaitu,

- a) Pemerintahan Mahasiswa (PEMA)
- b) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
- c) Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (UKMI)
- d) Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKMK)
- e) Merpati Putih
- f) *Taekwondo*
- g) *Medan Area Study Club* (MSC)
- h) Persatuan Basket (PB)
- i) Persatuan Sepakbola (PS)

- j) Persatuan Bola Voli (PBV)
- k) Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA)

2. Organisasi Mahasiswa *Extrauniversiter*(organisasi ekstra)

Organisasi ekstrakampus merupakan organisasi mahasiswa yang aktivitasnya berada di luar lingkup Universitas atau Perguruan Tinggi. Organisasi ekstra kampus biasanya berafiliasi dengan partai politik tertentu walaupun tidak secara eksplisit.

Adapun organisasi ekstra kampus di Universitas Medan Area yaitu :

- a) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- b) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
- c) Hisbut Tahrir Indonesia
- d) (HTI)
- e) Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA)
- f) Forum Komunikasi Mahasiswa Nias (FORKAMNIS)
- g) Ikatan Mahasiswa Batak Toba (IMABATO)
- h) Liga Mahasiswa Mandailing
- i) Pemuda Pancasila (PP)
- j) Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)

2.1.2.3. Manfaat Organisasi

Organisasi merupakan kegiatan yang tidak wajib atau pilihan yang penting untuk diikuti oleh mahasiswa selama studinya sehingga melengkapai hasil belajar secara utuh.

Dengan mengikuti kegiatan organisasi akan memperoleh manfaat sebagai berikut.

1. Melatih bekerja sama dalam bentuk tim kerja multi disiplin.
2. Membina sikap mandiri, percaya diri, disiplin dan bertanggungjawab.
3. Melatih berorganisasi.
4. Melatih berkomunikasi dan menyatakan pendapat di muka umum.
5. Membina dan mengembangkan minat bakat.
6. Menambah wawasan.
7. Meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan pada masyarakat dan lingkungan mahasiswa.
8. Membina kemampuan kritis, produktif, kreatif dan inovatif (Sukarman:2004).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa akan memperoleh banyak manfaat antara lain melatih kerja sama, menambah wawasan dan membina kepercayaan diri untuk tampil di depan umum. Selain itu mahasiswa juga dapat memperoleh wawasan yang luas.

2.1.2.4. Organisasi Mahasiswa Daerah

Sebagai bagian *civil society*, tentu mahasiswa memiliki daya peran strategis dalam hal pemerataan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama di kampung bagi kampung halamannya kelak. Namun hari ini, kesadaran akan tanggungjawab yang demikian, semisal *transformasi* pola pikir,

belum tersentuh secara maksimal, terkhusus organisasi mahasiswa kedaerahan yang secara institusional sebagai wadah mahasiswa dalam hal memfasilitasi peran strategisnya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memisahkan diri dari manusia lain. Apabila manusia hidup sendiri maka dia akan merasa takut atau tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dengan demikian maka manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama orang lain yang disebut dengan *social animal*. Tumbuh dan kembang naluri manusia untuk hidup bersama didasarkan atas kehendak dan kepentingan yang tidak terbatas. Menurut Plato, masyarakat ialah “merupakan refleksi dari manusia perorangan”. Suatu masyarakat akan mengalami keguncangan sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensia. Dalam menjalani hidupnya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, kebutuhan cita – cita dan lain-lain. Disamping itu manusia juga mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, namun secara psikologi keinginan manusia tak terhingga dan tidak dapat terpenuhi. Ketika kebutuhan pertama telah terpenuhi maka manusia masih mempunyai kebutuhan yang lain dan seterusnya, sehingga dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut setiap individu akan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat (*life of society*) atau kehidupan berkelompok (*life of group*).

Dari uraian diatas memperlihatkan bahwa manusia tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat, sehingga membentuk kelompok sosial atau organisasi

sosial. Keterlibatan seseorang dalam organisasi sosial diakibatkan karena faktor kepentingan, kesadaran keinginan untuk merubah realitas sosial menjadi lebih baik, dan lain – lain.

Sebagai bagian *civil society*, tentu mahasiswa memiliki daya peran strategis dalam hal pemerataan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama di kampung bagi kampung halamannya kelak. Namun hari ini, kesadaran akan tanggungjawab yang demikian, semisal transformasi pola pikir, belum tersentuh secara maksimal, terkhusus organisasi mahasiswa kedaerahan yang secara institusional sebagai wadah mahasiswa dalam hal memfasilitasi peran strategisnya.

Organisasi berbasis kedaerahan atau bisa juga disebut dengan organisasi kultur merupakan salah satu bentuk dari organisasi sosial, yang dibentuk untuk mencerdaskan kader, meneropong, mengembangkan, dan merubah daerah menuju ke arah yang lebih baik. Organisasi ini dibentuk atas dasar ego kultur, intelegensi, dan kesamaan budaya. Merupakan suatu keniscayaan bahwa daerah merupakan hal terpenting dalam hidup, karena dari sanalah kita berasal dan dari sanalah suatu saat kita akan kembali. Sehingga lahirnya organisasi kultur ini harus disambut baik oleh semua kalangan selama masih melihat daerah sebagai titik utama serta tidak melanggar norma-norma dan hukum yang telah ada dalam masyarakat.

Untuk menjawab tuntutan kehidupan saat ini, organisasi kultur seharusnya mempersiapkan kader yang cerdas dan berwawasan luas serta lebih melihat daerah sebagai objek kajian, yang meliputi bagian *internal* dan *external*. Bagian

internal adalah segala yang dimiliki daerah dan *external* adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi *internal* kedaerahan. Suatu problem yang merupakan *manifestasi socialproblem* adalah kepincangan-kepincangan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang bisa dirubah atau dihilangkan.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah masalah pendidikan Multikulturalisme, karena dengan pemahaman ini kita akan lebih saling menghargai perbedaan yang ada, baik itu perbedaan agama, ideologi, organisasi, kultur, dan lain sebagainya. Mengutip pendapat Samuel P. Huntington dalam tesisnya bahwa “benturan yang terjadi di dunia ini berupa benturan peradaban/budaya”. Pendapat yang dikemukakan oleh Huntington telah terbukti dan telah terjadi di mana – mana baik itu di dalam Negeri ini maupun terjadi di luar Negeri, konflik SARA ini sering dijadikan sebagai dalih kebenaran, padahal konflik ini bukan bentuk dari konflik SARA tapi konflik kekuasaan yang dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kita harus jeli dan dapat menafsirkan realitas dengan baik agar tidak terjebak dalam ilusi yang sedang dimainkan.

2.1.3. Bhineka Tunggal Ika

2.1.3.1. Pengertian Bhineka Tunggal Ika

Diterjemahkan per patah kata, kata *bhinneka* berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata *neka* dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata *tunggal* berarti "satu". Kata *ika* berarti "itu". Secara harfiah *Bhinneka Tunggal Ika* diterjemahkan

"Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan (Budiarjo :1994).

2.1.3.2. Sejarah Bhineka Tunggal Ika

Sejak Negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang Negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit. Frasa tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno dan diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian terbentuklah Bhineka Tunggal Ika menjadi jati diri bangsa Indonesia. Ini artinya, bahwa sudah sejak dulu hingga saat ini kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat bangsa di negeri ini (Masyur, 2008).

Sumpah Palapa secara esensial, isinya mengandung makna tentang upaya untuk mempersatukan Nusantara. Sumpah Palapa Gajah Mada hingga kini tetap menjadi acuan, sebab Sumpah Palapa itu bukan hanya berkenaan dengan diri seseorang, namun berkenaan dengan kejayaan eksistensi suatu kerajaan. Oleh karena itu, sumpah palapa merupakan aspek penting dalam pembentukan Jati Diri (Tjahjopurnomo S. J dalam Masyur 2008). Pentingnya Sumpah Palapa karena

di dalamnya terdapat pernyataan suci yang diucapkan oleh Gajah Mada yang berisi ungkapan *“lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa”* (kalau telah menguasai Nusantara, saya melepaskan puasa/tirakatnya). Naskah Nusantara yang mendukung cita-cita tersebut di atas adalah Serat Pararaton. Kitab tersebut mempunyai peran yang strategis, karena di dalamnya terdapat teks Sumpah Palapa. Kata sumpah itu sendiri tidak terdapat di dalam kitab Pararaton, hanya secara tradisional dan konvensional para ahli Jawa Kuna menyebutnya sebagai Sumpah Palapa. Bunyi selengkapnya teks Sumpah Palapa adalah sebagai berikut: *Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”*.

Terjemahan:

Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasanya. Beliau Gajah Mada Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru) melepaskan puasa, jika (berhasil) mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru) melepaskan puasa (saya) (Dasim : 2007).

Kemudian dilanjutkan dengan adanya Sumpah Pemuda yang tidak kalah penting dalam sejarah perkembangan pembentukan Jati Diri Bangsa ini. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 secara historis merupakan rangkaian kesinambungan dari Sumpah Palapa yang terkenal itu, karena pada

intinya berkenaan dengan persatuan, dan hal ini disadari oleh para pemuda yang mengucapkan ikrar tersebut, yakni terdapatnya kata sejarah dalam isi putusan Kongres Pemuda Kedua. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang maha penting bagi bangsa Indonesia, setelah Sumpah Palapa. Para pemuda pada waktu itu dengan tidak memperhatikan latar kesukuannya dan budaya sukunya berkemauan dan berkesungguhan hati merasa memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini menandakan bukti tentang kearifan para pemuda pada waktu itu. Dengan dikumandangkannya Sumpah Pemuda, maka sudah tidak ada lagi ide Kesukuan atau ide Kepulauan, atau ide Propinsialisme atau ide *federaslisme*. Daerah-daerah adalah bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari satu tubuh, yaitu tanah Air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah ide kebangsaan Indonesia yang bulat dan bersatu, serta telah mengantarkan kita ke alam kemerdekaan, yang pada intinya didorong oleh kekuatan persatuan Indonesia yang bulat dan bersatu itu (Nopririn :2011).

Pada saat kemerdekaan diproklamkan, 17 Agustus 1945 yang didengungkan oleh Soekarno-Hatta, kebutuhan akan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tampil mengemuka dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara RI. Sejak waktu itu, Sumpah Palapa dirasakan eksistensi dan perannya untuk menjaga kesinambungan sejarah bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh. Seandainya tidak ada Sumpah Palapa, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) akan dikoyak-koyak sendiri oleh suku-suku bangsa Nusantara yang merasa dirinya bisa memisahkan diri dengan

pemahaman *federalisme* dan otonomi daerah yang berlebihan. Gagasan-gagasan memisahkan diri sungguh merupakan gagasan dari orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak mengerti sejarah bangsanya, bahkan tidak tahu tentang “*jantraning alam*” (putaran zaman) Indonesia (Nopririn :2011).

Dengan pilar bernama *Bhinneka Tunggal Ika* yang telah mengantarkan kita sampai hari ini menjadi sebuah bangsa yang terus semakin besar di antara bangsa-bangsa lain di atas bumi ini, yaitu bangsa Indonesia, meskipun berbedabeda (suku bangsa) tetapi satu (bangsa Indonesia). Dan dikuatkan dengan pilar Sumpah Palapa diikuti oleh Sumpah Pemuda yang mengikrarkan persatuan dan kesatuan Nusantara/bangsa Indonesia, serta proklamasi kemerdekaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh. Hal itu tidak terlepas dari pembentukan jati diri daerah sebagai dasar pembentuk jati diri bangsa. Hingga saat ini, ke-Bhinneka Tunggal Ika-an tersebut, di beberapa daerah masih terwujud dengan mempertahankan etika masing-masing kedaerahan, baik budaya, bahasa, sastra, maupun seni daerahnya, yang hidup berdampingan dengan tentram dan damai. Mengapa hal itu tetap dapat terwujud? Jawaban yang paling mendasar adalah terdapat pada individu manusia yang memiliki perilaku budaya sebagai landasan tindakannya. Akan tetapi tidak terlepas dari sifat dasar manusia itu sendiri, yaitu baik, jujur, cerdas, murah hati, tidak berbahaya, suka menolong, ramah dan suka damai. Sifat dasar tersebut tercermin di dalam keseharian pergaulan antar manusia yang mengatur komunikasi, perilaku, dan adat istiadat sebagai etika yang dimiliki oleh suku-suku bangsa masing-masing.

2.1.3.3. Peran Bhinneka Tunggal Ika sebagai Faktor Pembentuk

Identitas Bangsa Indonesia.

Jati diri bangsa Indonesia atau identitas bangsa Indonesia merupakan suatu yang pelik, ada yang beranggapan bahwa sebagai bangsa Indonesia harus melepaskan identitasnya yang berifat kesukuan atau keanggotaannya dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat. Jati diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang telah disepakati bersama seperti cita-cita masa depan yang sama berdasarkan pengalaman sejarah baik pengalaman yang menggembirakan maupun yang pahit. Semuanya itu telah membentuk rasa solidaritas yang tinggi sebagai satu bangsa dan oleh sebab itu bertekad untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik.

Bangsa Indonesia terdiri dari lebih dari 700 suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Itu sebabnya juga mengapa Bhinneka Tunggal Ika merupakan lambang negara kita sebagaimana dicantumkan dalam pasal 36A UUD. Dari kebhinnekaan itulah ingin diwujudkan identitas Bangsa Indonesia. Dengan kata lain Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran nyata dari keadaan masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk dan ini pun dijadikan sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk integrasi nasional.

Masalah yang dihadapi oleh bangsa masyarakat-negara yang sedang berkembang tidak hanya struktur masyarakat yang sangat majemuk secara kultural sehingga sukar menciptakan suatu identitas yang disepakati bersama, tetapi juga masyarakat-negara yang bagaimana yang hendak mereka ciptakan.

Bhinneka Tunggal Ika seperti kita pahami sebagai motto negara, yang diangkat dari penggalan kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman Kerajaan Majapahit (abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu. Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial-kultural dibangun diatas keanekaragaman.

Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakatnya yang majemuk. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut juga diharapkan sebagai landasan atau dasar perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar dikenal di mata dunia sebagai bangsa yang multikulturalisme.

Oleh karena itu, masyarakat majemuk menjadikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai ideologi nasional, sedangkan nilai-nilai lain seperti individualisme, komunisme, fasisme, dan teokrasi tidak mereka jadikan sebagai ideologi nasional karena dipandang tidak tepat dan tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat. Selain itu, masyarakat yang majemuk juga dipandang sebagai masyarakat yang rentan dengan konflik yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, maka dari itu nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan yang diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar perjuangan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

2.1.3.4. Bhinneka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas

Bhinneka Tunggal Ika merupakan esensi wawasan kebangsaan Indonesia, karena Indonesia secara geografis kepulauan dan penduduknya heterogen. Dalam kondisi demikian, pilihan Bhinneka Tunggal Ika bukanlah suatu kebetulan melainkan suatu kebutuhan. Secara sosiologis perbedaan memang potensial untuk terjadinya konflik, walaupun secara filosofis bahwa persatuan yang sinergik.

Kelangsungan prinsip Bhinneka Tunggal Ika akan tetap eksis sejalan dengan berkembangnya wawasan kebangsaan, yang berbasis pada kesadaran identitas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan heterogen penduduknya. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, membawa konsekuensi bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah laut dimana ditengah-tengahnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Oleh karenanya, laut disini bukan sebagai pemisah melainkan sebagai pemersatu, konsekuensi selanjutnya adalah diantara kita hak dan kewajibannya sama. Sehingga, jika salah satu wilayah di salah satu pulau mendapat ancaman baik dari dalam maupun dari luar, maka seluruh isi pulau yang lain di Indonesia wajib membelanya. Tetapi juga sebaliknya, jika di salah satu wilayah (pulau) ada rejeki dari Tuhan, ya dibagi-bagi keseluruh pulau yang ada, tentu melalui mekanisme yang legal.

Demikian juga sebagai bangsa yang heterogen, hanya dapat bersatu jika masing-masing pihak menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan orang lain untuk sama dengan dirinya. Oleh karena itu persatuan disini, tidak berarti menghilangkan identitas daerah, dengan kata lain persatuan yang sinergik.

Bhinneka Tunggal Ika adalah solusi kehidupan modern dalam berbangsa dan bernegara, karena di era globalisasi, dunia menjadi satu sistem sehingga tidak ada satupun negara yang homogen, oleh karenanya paham nasionalisme menjadi kebutuhan. Persatuan adalah kebutuhan bagi negara bangsa, mengingat dampak negatif globalisasi akan menggerogoti kedulatan negara bangsa, dalam hal inilah prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi penting.

Keanekaragaman baru dapat menjadi perekat bangsa bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika:

1. Ada nilai yang berperan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Adanya standar yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam rangka menilai sikap dan tingkah laku serta cara bangsa menuju tujuan.
3. Mengakui dan menghargai hak dan kewajiban serta hak asasi manusia dalam berbagai aspek (agama, suku, keturunan, kepercayaan, kedudukan sosial
4. Nilai kesetiaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesemuanya diatas, berada dalam sistem nilai Pancasila, oleh karenanya Bhinneka Tunggal Ika keberlanjutannya tergantung pada komitmen bangsa terhadap Pancasila. Disamping beberapa hal tersebut diatas, juga dukungan sistem pemerintahan yang demokratis, desentralisasi (otonomi) akan memberi ruang yang kondusif bagi perkembangan positif heterogenitas bangsa Indonesia. Tentu perlu adanya pemerintah daerah yang semakin dewasa, dan pemerintah

pusat yang berwibawa untuk menjamin stabilitas nasional dan kesatuan bangsa, hubungan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati dalam kelompok sosial.

Heterogenitas (suku, agama, ras) adalah *de facto* sebagai bangsa Indonesia, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah solusi terhadap fakta yang kita hadapi guna mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Embrio Bhinneka Tunggal Ika adalah sumpah pemuda 28 Oktober 1928, sedang *causa material* Pancasila adalah budaya, agama, adat istiadat yang berkembang di wilayah nusantara. Oleh karenanya Pancasila adalah ruang untuk berkembangnya heterogenitas, sedang Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip-prinsip (komitmen) yang dipegang dalam mengembangkan heterogenitas bangsa ini. Pancasila, sebagai sistem nilai sangat abstrak, oleh karenanya perlu diimplementasikan, dalam kaitan inilah Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai basis kesadaran identitas sebagai bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesadaran Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada ruang untuk berbuat diskriminasi, karena istilah “IKA” agama, adat istiadat yang berkembang di wilayah nusantara. Oleh karenanya Pancasila adalah ruang untuk berkembangnya heterogenitas, sedang Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip-prinsip (komitmen) yang dipegang dalam mengembangkan heterogenitas bangsa ini.

Pancasila, sebagai sistem nilai sangat abstrak, oleh karenanya perlu diimplementasikan, dalam kaitan inilah Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai basis kesadaran identitas sebagai bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesadaran Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada ruang untuk berbuat diskriminasi, karena istilah “IKA” mewarnai demokrasi di Indonesia. Memang demokrasi merupakan alat, oleh karenanya efektivitas dan produktivitas alat tersebut akan sangat dipengaruhi oleh si pengguna alat tersebut.

Jika Pancasila ingin berperan dalam demokrasi di Indonesia, maka Pancasila harus mampu mengatasi masalah-masalah yang menjadi prasarat untuk terlaksananya demokrasi secara baik. Demokrasi, dari kata demos dan kratos, artinya kedaulatan ditangan rakyat, maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan harus independen, terlepas dari ketergantungan pihak lain, sehingga jika rakyat masih terikat oleh kemiskinan maka rakyat menjadi tidak independen. Selama rakyat masih terikat oleh kemiskinan, maka selama itu pula demokrasi tidak akan berjalan baik (terjadi politik uang), maka kesejahteraan sebagai salah satu prasarat berlangsungnya demokrasi yang baik. Oleh karena itu “persamaan” dan “kesetaraan” (IKA) lebih diarahkan pada penciptaan kesejahteraan masyarakat yang humanism religious (Pancasila). Pancasila baik sebagai sarana maupun sebagai tujuan bangsa Indonesia, pada dasarnya ingin mencapai suatu kondisi yang mencerminkan suasana humanisme religious

Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi, hal ini bermakna bahwa demokrasi Pancasila senantiasa sejalan dengan hukum positif yang ada, sehingga dalam mengimplementasikannya tidak boleh dengan mengatasnamakan nilai-nilai demokrasi tetapi menimbulkan disintegrasi bangsa, atau konflik SARA. Pemilu secara berkesinambungan, sebagai implementasi dari kesadaran

bahwa sumber legitimasi kekuasaan politik bukan lagi dari atas, melainkan dari bawah (rakyat), maka rakyatlah yang punya kedaulatan untuk menentukan pemimpinnya.

Penghargaan HAM serta perlindungan hak-hak minoritas, demokrasi Pancasila merujuk kepada prinsip humanism-religious, sehingga demokrasi tidak akan berarti apa-apa tanpa dijiwai oleh HAM, tentu bertolak pada hakekat manusia yang monopluralis, yang berbeda dengan konsep manusia model liberalis maupun sosialis-komunis.

Kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Disinilah salah satu ciri pembeda (*differentia specipica*) dengan demokrasi Barat, bahwa demokrasi Pancasila dalam menyelesaikan masalah dengan melalui kompetisi ide-ide, sehingga keputusan bukan berdasarkan suara terbanyak melainkan berdasarkan ide yang paling baik dengan melalui musyawarah mufakat.

Partai Poitik, memang partai politik merupakan sokoguru demokrasi, namun bukan berarti semakin banyak partai politik semakin sempurna demokrasi, bagi bangsa Indonesia yang hiterogen terlalu banyak partai politik justru akan kontra produktif, mengingat demokrasi Pancasila lebih cenderung bersifat kualitatif.

Dengan demikian demokrasi Pancasila, menjamin kesetaraan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tegaknya hukum yang berdasarkan nilai Pancasila serta menjamin hubungan harmonis antara lembaga tinggi negara, sehingga tidak ada salah satupun lembaga tinggi negara yang lebih dominan atau tidak akan terjadi hegemoni kewenangan oleh salah satu lembaga tinggi negara. Demokrasi Pancasila, tidak mengutamakan voting dalam mengambil keputusan,

melainkan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan dari semua pihak yang terkait, oleh karena itu prinsip kebebasan dan kesetaraan, bermakna disamping bebas menyampaikan pemikirannya juga harus bersedia untuk mendengarkan dan adanya kesediaan untuk memahami pihak lain. Oleh karena itu, Demokrasi Pancasila merupakan jawaban yang memang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia, terutama dalam menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat heterogen, sehingga setiap kebijakan publik lahir dari hasil bukan dipaksakan. Demokrasi Pancasila, tidak saja menyangkut demokrasi politik sebagaimana telah terungkap diatas, melainkan juga demokrasi dalam bidang ekonomi maupun sosial-budaya.

2.1.3. Pluralisme

Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Permendagri No. 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan).

Pluralisme merupakan pengakuan atas perbedaan, dan perbedaan itu sesungguhnya sunatullah dan merupakan sesuatu yang nyata serta tidak bisa dipungkiri. Penolakan terhadap pluralisme itu menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik, karena meniadakan sesuatu yang nyata merupakan pengingkaran terhadap kehendak Tuhan. Pluralisme pada tujuannya tidak sebatas menghendaki pengakuan atas keberbedaan itu, melainkan juga penghormatan

atas kenyataan perbedaan. Untuk itu, sudah seharusnya diakui dengan jujur bahwa masyarakat Indonesia memang berbeda-beda dan karenanya segala perbedaan itu untuk dihormati (Zamron :2013).

Berbagai peristiwa yang sempat menggejolak di sebagian wilayah Indonesia beberapa tahun terakhir mengindikasikan telah terjadi pertentangan menyangkut berbagai kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat. Dan dalam berbagai pertentangan itu, isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) begitu cepat menyebar ke berbagai lapisan sehingga tercipta suasana konflik yang cukup berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Eskalasi pertentangan yang dilapisi baju SARA seringkali menciptakan konflik kekerasan yang lebih menegangkan dan meresahkan.

Dalam suasana seperti ini agama seringkali menjadi titik singgung paling sensitif dan eksklusif dalam pergaulan pluralitas masyarakat. Masing-masing pihak mengklaim bahwa dirinyalah yang paling benar, sedangkan pihak lain adalah yang salah. Persepsi bahwa perbedaan adalah merupakan sesuatu yang buruk, suatu hal yang menakutkan, sudah begitu rupa mendarah daging dalam jiwa umat beragama. Akibat dari perseteruan tersebut adalah kesengsaraan semua pihak, yang bertikai maupun yang tidak mengetahui apa-apa. Pada dasarnya akibat dari konflik adalah kerugian yang menyeluruh di berbagai pihak. Rakyat kecil lagi-lagi menjadi korban dan harus menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Berbagai peristiwa itu telah memberi gangguan cukup serius terhadap tekad bersama untuk membangun bangsa Indonesia yang toleran dalam kehidupan antarpemeluk agama, toleran

dalam kebudayaan, toleran dalam politik, dan toleran dalam aspek-aspek kehidupan lainnya.

Terlepas dari provokator dan lain sebagainya yang bisa menjadi sasaran kesalahan dalam setiap kekacauan, yang jelas umat beragama belum mempunyai kontrol emosi yang memadai sehingga begitu mudah terpancing untuk melakukan berbagai macam tindakan anarki. Umat beragama masih diliputi oleh rasa sentimen keagamaan dan fanatisme yang begitu kuat mengakar dalam dirinya. Padahal sentimen keagamaan dan fanatisme paling tidak memberi andil atas terciptanya setiap adegan kerusuhan dan terjadinya konflik. Konflik yang mengatasnamakan agama pada umumnya disebabkan oleh penyimpangan arah proses sosial yang berkorelasi logis dengan bentuk-bentuk penyimpangan interaksi sosial antar umat beragama.

Oleh karena itu, (Zamron :2013) Mengatakan bahwa fenomena demikian menunjukkan adanya keterputusan antara nilai-nilai keberagamaan yang selama ini dipahami dan perilaku sosial. Banyak hal yang mesti dibenahi, tetapi paling tidak upaya pemeliharaan atau pemulihan keharmonisan hubungan sosial dan kerukunan umat beragama yang sempat terusik akibat konflik SARA beberapa tahun belakangan, dipandang perlu melibatkan semua komponen masyarakat secara komprehensif dan integratif, baik pada arah nasional maupaun lokal. Pemecahan yang diasumsikan tentu saja berlandaskan pada dinamika obyektif masyarakat itu sendiri sesuai struktur yang berkembang secara aktual.

Pendidikan merupakan agen perubahan kebudayaan (*cultural broker*) bagi masyarakat sekitar, mau atau tidak pendidikan harus melakukan

pembenahan. Hal ini merupakan tugas berat bagi insan akademis di Perguruan Tinggi, di satu sisi kehidupan modern menuntut kemampuan intelektual untuk merespon secara positif dan kreatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tanpa harus melepaskan diri dari substansi dan prinsip-prinsip universal agama. Pluralitas masyarakat Indonesia, di sisi lain, juga menuntut sikap keberagaman yang inklusif dan toleran. Dengan menggunakan paradigma kontekstualisasi pemikiran klasik, sikap-sikap itu yaitu respon positif dan kreatif terhadap perubahan dan sikap keberagaman yang inklusif dan toleran bisa diekspresikan secara nyata oleh KH. Abdurrahman Wahid. Ia merupakan seorang tokoh budaya, agama, serta politikus yang mampu mempeluangkan keragaman sekaligus seorang manusia yang mampu menikmati keragaman itu (Elmirzanah:2002).

2.1.4. Integrasi

2.1.4.1. Pengertian Integrasi

Integrasi adalah konsep yang menegaskan bahwa integrasi keilmuan yang disasar bukanlah model *melting-pot integration*, di mana integrasi hanya difahami hanya dari perspektif ruang tanpa substansi. Integrasi yang dimaksud adalah model penyatuan yang antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan yang kuat sehingga tampil dalam satu kesatuan yang utuh. Hal ini perlu karena perkembangan ilmu pengetahuan yang dipelopori Barat sejak lima ratus tahun terakhir, dengan semangat modernisme dan sekulerisme telah menimbulkan pengkotak-kotakan (*comparmentalization*) ilmu dan mereduksi ilmu pada bagian

tertentu saja. Dampak lebih lanjut adalah terjadinya proses dehumanisasi dan pendangkalan iman manusia (Srijanti : 2007).

Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi (Srijanti : 2007).

Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing.

Integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu :

Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu.

Integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Dalam KBBI disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi satu. Integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras

dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan ras tersebut (Syafa'atun :2002).

Menurut pandangan para penganut *fungsiionalisme struktural, system social* senantiasa terintegrasi di atas dua landasan berikut:

Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya *consensus* di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (*cross-cutting affiliations*) (Rusman :2005).

2.1.4.2. Faktor-faktor Pendukung Integrasi

“Dan perpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah menjadi bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.” (Q.S. Ali Imran : 103).

Ayat di atas secara tegas menjelaskan bahwa agama Islam telah mempersatukan dan mempersaudarakan pemeluknya. Dan mereka tidak diperbolehkan bercerai-berai dan saling bermusuh-musuhan. Persaudaraan dalam Islam tidak sebatas pertalian persahabatan yang sangat dekat bagaikan antara adik dan kakak seayah dan seibu, akan tetapi persaudaraan Islamiyyah menyangkut persaudaraan lahir dan batin. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi

Muhammad saw dengan haditsnya. *“seorang muslim itu adalah (seorang yang bisa menjaga) orang muslim lainnya selamat dari lidah dan tangannya.” Dan dalam riwayat lain Nabi bersabda : “perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling cintai mencintai dan saling sayang menyayangi bagaikan satu anggota badan. Apabila salah satu anggota badan merasa sakit, maka seluruh anggota badan tersebut ikut merasa sakit, seperti orang sakit terkena demam dan panas.” (HR Ahmad dan Muslim dari Nu'man bin Basyir).*

Ketika Nabi Sallahu'alaihi wa salam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, maka dibentuklah pemerintahan Islam pertama dan Nabi sebagai pemimpin. Untuk mengatur jalannya roda pemerintahan, dibuatlah aturan atau undang-undang sedemikian rupa, diantaranya undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah peraturan mengenai hubungan masyarakat minoritas non muslim dengan masyarakat muslim ataupun sebaliknya. Diantara aturan itu adalah masyarakat mayoritas (muslim) tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum minoritas non muslim. Bahkan Nabi saw berpesan melalui haditsnya: “Barang siapa yang menyakiti orang (kafir) dzimmi, maka ia telah menyakitiku.” (Al-Hadits). Dari kutipan hadits di atas kita bisa memahami bahwa Nabi saw memberikan jaminan keselamatan kaum minoritas. Dan ini merupakan gambaran sekilas bentuk persaudaraan sebangsa dan setanah air.

Hal yang senada juga tidak hanya disampaikan oleh umat islam, umat agama lainnya juga menyampaikan hal yang sama salah satu nya adalah umat Kristen.

Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Matius 19:19). Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang - orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, Akulah TUHAN (Imamat 19:18). Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih (Yoh 4:8). Injil memiliki banyak ajaran mengenai menaati perintah sementara hidup di antara orang-orang yang berbeda kepercayaan dan kebiasaan. Ajaran mengenai perselisihan adalah penting. Ketika Kristus yang telah bangkit mendapati orang -orang Nefi berbantahan mengenai cara pembaptisan, Dia memberikan petunjuk yang jelas mengenai bagaimana tata cara ini hendaknya dilaksanakan. Kemudian Dia mengajarkan asas besar ini: “Dan tidak akan ada perbantahan di antara kamu, seperti yang telah ada hingga kini; tidak juga akan ada perbantahan di antara kamu mengenai pokok-pokok ajaran-Ku, seperti yang telah ada hingga kini. Karena sesungguhnya, sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, dia yang memiliki semangat perselisihan bukanlah dari-Ku, tetapi dari iblis, yang adalah bapa perselisihan, dan dia menghasut hati manusia untuk berselisih dengan amarah, satu sama lain. Lihatlah, ini ajaran-Ku, bahwa hal-hal seperti itu hendaknya diakhiri” (3 Nefi 11:28–30).

Dalam umat beragama telah diajarkan bagaimana untuk saling menjaga dan menyayangi bangsa walau pun berbeda dalam keyakinan.

Adapun Faktor – faktor yang mendukung integrasi di Indonesia antara lain :

1. Penggunaan bahasa Indonesia telah menjadi bahasa pemersatu yang dipelajari, digunakan, dan bahkan dijadikan sebagai simbol kebanggaan negara Indonesia.
2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia sehingga diharapkan tidak ada satu suku bangsa pun yang ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila, yang sekaligus berfungsi sebagai ideologi sosial politik bersama Bangsa.
4. Adanya jiwa dan semangat gotong royong yang kuat serta rasa solidaritas dan toleransi keagamaan yang tinggi, sehingga mudah untuk mewujudkan kerukunan nasional dan kerukunan umat beragama.
5. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan yang diderita cukup lama oleh seluruh suku bangsa di Indonesia.

Hal ini melahirkan perasaan senasib untuk merdeka serta bebas membangun mewujudkan jati diri bangsa Indonesia.

2.1.4.3. Faktor-faktor Penghambat Integrasi

Faktor-faktor yang menghambat tercapainya integrasi dalam masyarakat adalah gejala atau fenomena sosial yang dikategorikan sebagai proses sosial yang disosiatif. Sebagai contoh adalah hal-hal dibawah ini:

1. Konflik atau pertentangan akibat tidak tuntasnya penyelesaian suatu masalah.
2. Persaingan tidak sehat yang melahirkan kontravensi dan mengarah pada pertentangan atau konflik.
3. Prasangka buruk yang dilator belakangi oleh cemburu sosial.
4. Fanatisme yang berlebihan karena perbedaan ras, etnis, kebudayaan, agama dan kepercayaan, daerah tempat tinggal, mayoritas, dan minoritas.
5. Pembedaan perlakuan para pemimpin terhadap warga masyarakat, baik secara individual maupun kelompok.
6. Rendahnya sikap toleransi dalam hidup bermasyarakat.
7. Berlangsungnya tindakan anggota masyarakat baik secara individual maupun kelompok yang dinilai mengganggu keteraturan dan keseimbangan hidup bermasyarakat.
8. Lemahnya dalam menjaga nilai – nilai ke Bhineka Tunggal Ikaan dan Pancasila (Syafa'atun : 2002).

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka kegiatan penelitian, seorang peneliti harus menguasai teori-teori sebagai argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting

(Sugiyono:2012). Oleh karena itu pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran penulis pada kegiatan penelitian ini tentang peran organisasi kemahasiswaan daerah dalam menjaga ke Bhineka Tunggal Ikaan.

